

**MODEL PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) TIRTO
RINGIN MAKMUR DI DESA NGRINGINREJO KECAMATAN KALITIDU
DALAM MEWUJUDKAN LUMBUNG PANGAN NEGERI
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Ayu Dwi Lestari

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (Ayudwilestari08@gmail.com)

M. Farid Ma'ruf, S. Sos., M.AP

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dapat menjadi lumbung pangan negeri. Untuk itu dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun dalam upaya tersebut terdapat kendala ketersediaan air dalam pertanian. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). HIPPA merupakan kelembagaan pengelolaan irigasi yang dibentuk petani pemakai air secara demokratis untuk memfasilitasi dan mengatur pembagian air dengan aturan yang berkembang di daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan model pemberdayaan petani melalui HIPPA Tirto Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan CIPOO (Context-Input-Process-Output-Outcome). Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Snowball Sampling. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi, observasi, serta wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan petani jika dilihat dengan pendekatan CIPOO beberapa pendekatan belum terpenuhi. Jika dilihat dari Context, yang meliputi kelembagaan, sistem manajemen, kinerja organisasi dan penguasaan materi pemberdayaan sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya menguasai materi pemberdayaan. Sedangkan jika dilihat dari pendekatan Input, Process, Output dan Outcome sudah terpenuhi dengan tersusunnya AD/ART dan laporan keuangan namun untuk program kerja belum pernah disusun. Selain itu jika dilihat tahap keberadaannya, HIPPA Tirto Ringin Makmur berada pada tahap keberdayaan I yaitu sebagai mitra kerja/pendamping dalam evaluasi program pendampingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan belum adanya kelengkapan kebutuhan organisasi secara kelembagaan seperti belum menguasai materi pemberdayaan sepenuhnya. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan HIPPA dikelola petani secara demokratis agar pengelolaan tidak terjadi tumpang tindih dengan pemerintahan desa. Selain itu Pemerintah sebaiknya juga harus meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani melalui pelatihan yang harus bersifat continue dan merata. Serta melakukan pengawasan untuk melihat proses pelaksanaan pemberdayaan serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki HIPPA di Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci : Model Pemberdayaan, HIPPA, Lumbung Pangan

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

EMPOWERMENT MODEL FOR FARMERS THROUGH ASSOCIATION OF WATER USERS (HIPPA) TIRTO RINGIN MAKMUR IN NGRINGINREJO VILLAGE KALITIDU SUBDISTRICT TO PRODUCTING FOOD BARN IN BOJONEGORO REGENCY

Ayu Dwi Lestari

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (Ayudwilestari08@gmail.com)

M. Farid Ma'ruf, S. Sos., M.AP

Abstract

Bojonegoro Regency Government dreaming for become a food barn of the country and make efforts to increase the agricultural production. The main obstacle is the water's availability. Bojonegoro Regency Government build an irrigation network and do empowerment for farmers through Association of Water Users (HIPPA) to overcome water's availability problem. It is irrigation management formed by water user farmers democratically to facilitate and regulate the distribution of water.

This research is going with qualitative descriptive approach aimed to describe the empowerment model for farmers through HIPPA Tirto Ringin Makmur Ngringinrejo Village Subdistrict Kalitidu Bojonegoro Regency. Sulistiyani's CIPOO (Context-Input-Process-Output-Outcome) is used for analysis the datas on this research. As for the source of the data collection techniques using the technique of interview, observation, and documentation with snowball sampling for collect the data. While data analysis technique started from data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results showed that the empowerment model farmers with CIPOO approach has not been completely worked. For Context, several aspects including institutional, management system, organizational performance, and material mastery aspects has been running well. But material mastery aspect not fully mastered yet. While for Input, Process, Output, and Outcome, has been running well with the drafting of organizational regulation basic (AD/ART) and financial report. But there is no drafting for work program that will be execute. Beside, the HIPPA Tirto Ringin Makmur is seen on empowerment phase 1 which is as a partner in the evaluation of community assistance program. It is showed by the lack of completeness of organization needs such as lack of material mastery. The recommendation on this research, HIPPA should managed by farmers democratically so that avoid the overlap over Village Government. Bojonegoro Regency Government should enhance the ability and skill of farmers through several training continuity. And also should conduct the surveillance effectively to see if empowerment accomplishment is going well, thus the facility and infrastructure of HIPPA.

Keywords: Empowerment Model, Association of Water Users Farmers (HIPPA), Food Barn

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai peranan penting agar penyelenggaraan pemenuhan pangan masyarakat dilaksanakan sama seperti pemenuhan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, upaya pemenuhan pangan masyarakat merupakan masalah serius dalam program pembangunan baik yang telah dicanangkan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Upaya pemenuhan pangan oleh Pemerintah Daerah dengan mewujudkan ketersediaan pangan juga dilakukan oleh pemerintah di Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri merupakan pusat produksi padi di Indonesia karena mampu menghasilkan produksi padi terbesar terutama Provinsi Jawa Timur dengan total produksi 12,198,707 ton. Daerah penghasil padi di Jawa

Timur dengan luas panen yang dominan pada tahun 2012 terdapat di Kabupaten Jember sebesar 158,57 ribu hektar dengan total produksi sebesar 970.096 ton, Lamongan 143,15 ribu hektar dengan total produksi sebesar 911.853, Bojonegoro 133,83 ribu hektar dengan total produksi sebesar 803.059,56 ton, Banyuwangi 118,19 ribu hektar, dan Ngawi sebesar 116,26 ribu hektar (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, 2013).

Sejalan dengan upaya pemenuhan pangan dengan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencanangkan visi yaitu "Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan". Dengan adanya visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimis mampu mencapai target produksi padi

pada tahun 2015 sebanyak 960 ribu ton. Hal ini seperti yang dikatakan Bupati Kabupaten Bojonegoro Suyoto, sebagai berikut :

“Kami yakin target produksi padi itu bisa terpenuhi. Ke depan Bojonegoro ingin menjadi lumbung pangan negeri. Target produksi padi itu dapat terpenuhi karena banyak lahan sawah yang sebelumnya kurang produktif kini menjadi produktif. Selain itu lahan sawah di daerah bantaran Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Kanor yang biasanya langganan banjir kini berhasil panen padi”. Pada Minggu (04/01/15)”.

(Sumber:www.blokbojonegoro.com)

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu sentra padi di Pulau Jawa dengan total produksi yang berpotensi meningkat tiap tahunnya. Hal ini diperjelas dengan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro (dalam Bojonegoro Dalam Angka, 2014) bahwa pada tahun 2011 total produksi yang mampu dicapai Kabupaten Bojonegoro sebanyak 707.970,41 ton, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 803.059,56 ton, 802.528,20 ton pada tahun 2013, dan 847.860,79 ton pada tahun 2014. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa asumsi kekurangan produksi padi yang ingin dicapai Kabupaten Bojonegoro sebesar 112.139,21 ton.

Guna mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun, terdapat kendala utama peningkatan produksi yaitu ketersediaan air dalam pertanian (Buku Profil Kabupaten Bojonegoro, 2012). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mengatasi ketersediaan air. Diantaranya dengan melakukan penyediaan infrastruktur jaringan irigasi, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa (JITUT/ JIDES), Jalan Usaha Tani, pompanisasi dan pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (Buku Profil Kabupaten Bojonegoro, 2012).

HIPPA sendiri telah ada sejak kepemimpinan Soeharto. HIPPA merupakan kelembagaan pengelolaan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis untuk memfasilitasi dan mengatur pembagian air. Di beberapa daerah HIPPA dikenal dengan nama lain seperti P3A (Petani Pemakai Air), Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat dan Darma Tirta di Jawa Tengah.

Di Kecamatan Kalitidu sendiri setidaknya terdapat 2 HIPPA. Salah satunya HIPPA Tirto Ringin Makmur yang terbentuk sejak 04 November 2009 di Desa Ngringinrejo dengan wilayah kerja meliputi di Daerah Irigasi Ngringinrejo.

Pedoman dari pemberdayaan HIPPA yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Irigasi dan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Meskipun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan keseriusannya dengan membuat regulasi tersebut. Namun hal tersebut tidak terlepas dari adanya kendala seperti kurangnya pendanaan seperti yang diungkapkan oleh Yudha dkk dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), sebagai berikut :

“Melihat permasalahan yang dihadapi seperti belum sesuai rencana Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap pengelolaan irigasi pertanian seperti kurangnya pendanaan, dan tidak banyak membantu di setiap program, kurangnya aktor/stakeholders dalam membantu pendanaan program yang ada menjadikan HIPPA dan masyarakat petani Desa Banjarjo Kecamatan Padangan bertindak sendiri mengelola pertaniannya agar menjadi lebih baik”.

Melihat keterbatasan tersebut, Pemerintah mencanangkan kebijakan iuran pengelolaan irigasi (IPI) yang dikelola oleh HIPPA. Dalam pelaksanaan pemungutan iuran tersebut, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh HIPPA Tirto Ringin Makmur seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut :

“untuk sementara, iuran pengelolaan irigasi di sini belum dilaksanakan mbak. Pengurus kesulitan menetapkan berapa iuran dan apa sanksinya apabila anggota tidak membayar. Saya juga tidak tega kalau misalnya ada anggota yang pas ditarik iuran tapi tidak ada uang. Soalnya kan petani tidak punya penghasilan tetap, cuma ada uang kalau waktu panen saja”. (Asrap, Ketua HIPPA Tirto Ringin Makmur wawancara tanggal 15 Maret 2015)

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mewujudkan lumbung pangan negeri di Kabupaten Bojonegoro, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Model Pemberdayaan Petani melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirto Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dalam Mewujudkan Lumbung Pangan Negeri di Kabupaten Bojonegoro”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana model pemberdayaan petani melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

Tirto Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dalam mewujudkan lumbung pangan negeri di Kabupaten Bojonegoro?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model pemberdayaan petani melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirto Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dalam mewujudkan lumbung pangan negeri di Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, baik teoritis maupun praktis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kajian dalam bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya kajian dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan HIPPA dalam upaya pencapaian lumbung pangan negeri di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian Dinas Pertanian dapat memberikan keputusan yang tepat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberdayaan petani dalam pemberdayaan HIPPA.

b. Bagi Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan program-program yang dilaksanakan dalam pemberdayaan HIPPA sebagai upaya pencapaian lumbung pangan negeri di Kabupaten Bojonegoro.

c. Bagi Mantri Pertanian Kecamatan Kalitidu: Dengan adanya penelitian ini Mantri Pertanian sebagai tenaga penyuluh dan pendamping pelaksanaan pemberdayaan HIPPA dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan pemberdayaan HIPPA sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan dan pendampingan baik yang terkait dengan pengelolaan program pemberdayaan HIPPA maupun program lainnya dimasa yang akan datang.

d. Bagi HIPPA Tirto Ringin Makmur: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi HIPPA Tirto Ringin Makmur untuk mengetahui pelaksanaan dan perkembangan pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur saat ini. Sehingga HIPPA Tirto Ringin Makmur dapat memberikan motivasi dan keputusan yang dapat digunakan untuk melaksanakan dan menyukseskan Lumbung Pangan Negeri yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

e. Bagi Universitas: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang berupa hasil atau laporan penelitian yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian-penelitian sosial yang ada serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang serupa.

f. Bagi Mahasiswa: Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi peneliti dan mahasiswa untuk mengetahui pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah dalam pencapaian lumbung pangan negeri.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pemberdayaan berasal dari penerjemahan Bahasa Inggris “empowerment” yang bermakna “pemberian kekuasaan”, karena power bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya”, tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa” (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:1). Sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan atau membuat berdaya suatu pihak. Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012:47) juga menyebutkan bahwa secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, Kartasmita (dalam Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2012:41-42) setidaknya menyebutkan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (enabling).
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).
- 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Solomon (1976), Swift & Levin (1987), Kieffer (1981), Rappaport (1981, 1984), dan Dubois dan Miley (1992) yang dikutip oleh Fahrudin (17-18) menyebutkan beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan, antara lain:

- a. *Empowerment* adalah proses kolaboratif, di mana klien dan pekerja sosial bekerjasama sebagai partner.
- b. Proses *empowerment* melihat sistem klien sebagai pemegang peranan penting (*competent*) dan mampu memberikan akses kepada sumber-sumber dan peluang-peluang.
- c. Klien harus menerima diri mereka sendiri sebagai causal agent, yang mampu untuk mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup.
- e. Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang merupakan hasil dari kompleksitas faktor faktor yang mempengaruhinya (Solomon, 1976).
- f. Jaringan sosial informal adalah sumber pendukung yang penting untuk menyematani tekanan dan membangun kompetensi dan kontrol diri.
- g. Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka, dan dalam mencapai tujuan, pengertian dan hasil dari pemberdayaan harus mereka artikulaskan sendiri.
- h. Tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam *empowerment* (Swift & Levin, 1987).
- i. *Empowerment* merupakan upaya untuk memperoleh sumber-sumber dan kemampuan menggunakan sumber-sumber tersebut dengan cara efektif.
- j. Proses *empowerment* adalah proses yang dinamis, sinergi, selalu berubah dan berevolusi, kerana masalah-masalah selalu mempunyai banyak cara pemecahan.

- k. Empowerment dapat dicapai melalui kesepadanan struktur-struktur pribadi dan perkembangan sosio-ekonomi.

4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (dalam Suharto, 2010:67-68), terdapat pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

5. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2007), pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu :

- a. Penyadaran
Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, *belief* dan *healing*.
- b. Pengkapasitasan
Disebut “*capacity building*” atau memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses *capacity building*

terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai.

c. **Pendayaan**

Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

6. Indikator Keberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, dari yang tidak berdaya sampai kepada tingkat keberdayaan masyarakat yang optimal. Susiladiharti (dalam Huraerah, 2011) menggambarkan keberdayaan masyarakat dalam 5 tingkatan yaitu :

- Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*)
- Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan
- Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.
- Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya.

B. Model Pemberdayaan Agen Pembaharu

1. Pengertian Agen Pembaharu

Menurut Ibrahim dalam Chairani, agen pembaharu (*agent of change*) ialah orang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengusaha pembaharu (*change agency*). Selain itu agen pembaharu juga merupakan stakeholder yang harus ditingkatkan keberdayaannya karena berhubungan langsung dengan masyarakat yang akan diberdayakan (Sulistiyani, 2004:114).

2. Model Pemberdayaan Agen Pembaharu

Model pemberdayaan untuk memaksimalkan keberdayaan agen pembaharu memerlukan model yang tepat yang hendaknya memiliki kelembagaan yang kuat, kemampuan manajemen, sumber daya yang cukup, dan kinerja yang baik. Analisis model tersebut dituangkan dalam bentuk kerangka kerja konseptual yang mempergunakan pendekatan

CIPOO (*Context-Input-Process dan Output-Outcome*).

a. *Context* yaitu konteks pemberdayaan agen pembaharu menjelaskan program atau kegiatan yang sesuai untuk dikembangkan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu. *Context* meliputi:

- Aspek kelembagaan, yaitu bagaimana kelembagaan yang ada bisa mewadahi berbagai unsur kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Aspek ini menyangkut efisiensi struktur, fungsi, gaya kepemimpinan yang visioner, adanya diskresi dalam pengambilan keputusan, fungsionalisasi hubungan dan komunikasi interaktif.
- Aspek sistem manajemen, diarahkan dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan orientasi NPM (*New Public Management*) seperti fungsi-fungsi PAFHIER yaitu meliputi *Policy Analysis, Finance, Human Relations, Information, External Relations*.
- Aspek kinerja organisasi, merupakan bagaimana organisasi ditingkatkan kemampuannya yang dinyatakan melalui indikator efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan yang baik.
- Aspek penguasaan materi pemberdayaan, dimana materi tersebut meliputi permasalahan substansial kemiskinan, solusi dan pendekatan untuk mencapai kemandirian masyarakat.

b. *Input* adalah seluruh potensi internal yang dimiliki oleh agen pembaharu dan eksternal yang berkaitan dengan agen pembaharu dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada proses pemberdayaan agen pembaharu. *Input* menggambarkan sumber daya, fasilitas yang diperlukan dalam memberdayakan agen pembaharu.

c. *Process* adalah seluruh kegiatan/langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu, yang terdiri atas:

- Pendekatan *capacity building* untuk pemberdayaan kelembagaan agen pembaharu.
- Pendekatan *New Public Management* (NPM) untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal.

3. Pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasional agen pembaharu.

4. Pendekatan substansial melalui pengorganisasian *knowledge, attitude, practice* (KAP) agar agen pembaharu menguasai aspek dan substansi kemiskinan, mampu menentukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

d. *Output* adalah hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan akan mencapai kompetensi sebagai agen pembaharu yang berdaya yang secara bertahap dapat diwujudkan. Adapun tingkatan keberdayaan agen pembaharu tersebut adalah:

1. Proses *capacity building* dapat menghasilkan agen pembaharu yang memiliki kemampuan organisasional yang kuat (*establish*).
2. Proses NPM yang dilakukan dapat menghasilkan kemampuan manajerial, dengan demikian tingkat keberdayaan yang diperoleh adalah sebagai agen pembaharu yang efisien.
3. Proses perbaikan kinerja agen pembaharu dapat mengantarkan pada pencapaian tingkat keberdayaan sebagai agen pembaharu yang memiliki kinerja tinggi.
4. Proses substansi KAP dapat mengantarkan pada tingkat keberdayaan agen pembaharu sebagai agen yang profesional.

e. *Outcome* adalah nilai manfaat yang ditimbulkan setelah agen pembaharu memiliki tingkat keberdayaan tertentu. Adapun tingkat keberdayaan yang diperoleh adalah :

1. Tahap I, agen pembaharu berdaya sebagai mitra kerja/pendamping dalam evaluasi program pemberdayaan masyarakat.
2. Tahap II, agen pembaharu berdaya sebagai mitra kerja kerja/pendamping dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat.
3. Tahap III, agen pembaharu berdaya sebagai mitra kerja/pendamping dalam advokasi.
4. Tahap ke IV, agen pembaharu berdaya sebagai mitra dalam perencanaan hingga evaluasi program pemberdayaan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah model pemberdayaan petani melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirta Ringin Makmur yang diterapkan di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang dilihat dengan pendekatan CIPOO (*Context-Input-Process-Output-Outcome*) yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004:114-121. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Pemberdayaan HIPPA

a. Gambaran Umum Desa Ngringinrejo

Desa Ngringinrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kalitidu yang dikenal sebagai desa agrowisata belimbing dengan luas wilayah $\pm 166,065$ Ha. Wilayah Desa Ngringinrejo terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Mejayan, Dusun Ngringin dan Dusun Margorejo yang terbagi menjadi 11 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW) dengan total keseluruhan jumlah penduduk 2123 jiwa dengan rincian 1046 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1077 berjenis kelamin perempuan dengan mata pencaharian yang masih didominasi oleh pekerjaan di sektor pertanian sebanyak 567 orang, kemudian karyawan dari perusahaan swasta menduduki peringkat kedua dengan jumlah 28 orang dan sektor perdagangan menduduki urutan ketiga dengan jumlah 21 orang. Adapun penggunaan lahan Desa Ngringinrejo mayoritas digunakan untuk lahan sawah dan lahan perkebunan rakyat dengan prosentase sebesar 48,36 persen dan 23,78 persen.

2. Pelaksanaan Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Pemberdayaan HIPPA merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pertanian. Kebijakan tersebut ditandai dengan mulai diteruskannya pengelolaan irigasi kepada HIPPA. Di Desa Ngringinrejo sendiri, proses penyerahan pengelolaan irigasi dilakukan ketika HIPPA dipimpin oleh Bapak Hardo yang ditandai dengan adanya peran serta pengurus HIPPA sejak awal kegiatan pemberdayaan dalam mengambil keputusan, perencanaan,

pelaksanaan kontruksi jaringan irigasi dan pemeliharaan irigasi serta dalam pembentukan HIPPA Tirto Ringin Makmur. Serta dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan petani.

Pemberdayaan HIPPA difokuskan kepada pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya manusianya. Sumber daya yang dimiliki HIPPA Tirto Ringin Makmur merupakan sumber daya yang dipilih berdasarkan potensi yang dimilikinya. Sumber daya ini meliputi pengurus yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Bagian Teknis dan Ketua-ketua blok. Sejak HIPPA Tirto Ringin Makmur dipimpin oleh Bapak Asrap telah terjadi beberapa pergantian pengurus. Diantaranya jabatan Sekretaris yang dulunya dipegang oleh Bapak Sutomo digantikan oleh Bapak Rudianto, dan Bagian Teknis yang dulunya dipegang oleh Bapak Sakijo digantikan oleh Bapak Rasim.

Pelaksanaan pemberdayaan HIPPA di Kabupaten Bojonegoro sendiri telah dilaksanakan sejak kepemimpinan Soeharto. Namun pemberdayaan HIPPA di Desa Ngringinrejo dilaksanakan mulai tahun 2009, sejak Desa Ngringinrejo dipimpin oleh Bapak Yahya dan HIPPA di ketuai oleh Bapak Hardo. Namun sejak Bapak Sudjarwo memimpin Desa Ngringinrejo, pemberdayaan HIPPA di Desa Ngringinrejo menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan kepemimpinan dari HIPPA juga dipegang oleh Bapak Sudjarwo selaku Kepala Desa Ngringinrejo.

HIPPA mulai aktif lagi sejak terjadi pergantian Kepala Desa dengan ditandai adanya musyawarah untuk membentuk pengurus HIPPA. Musyawarah untuk pembentukan kepengurusan HIPPA tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten yang menangani irigasi (Bappeda, Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian). Dalam pemberdayaan HIPPA di Ngringinrejo, musyawarah untuk pembentukan kepengurusan dilakukan di Balai Desa.

B. PEMBAHASAN

Pada dasarnya HIPPA Tirto Ringin Makmur berperan sebagai agen pembaharu dalam pemberdayaan HIPPA yang berpotensi sebagai mitra pemerintah dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Untuk memberdayakan agen pembaharu, diperlukan model pemberdayaan yang tepat. Menurut Sulistiyani, model pemberdayaan yang tepat untuk agen pembaharu dapat dituangkan dalam bentuk

kerangka kerja konseptual yang mempergunakan pendekatan CIPOO (*Context-Input-Process-Output-Outcome*).

Untuk melihat model pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur peneliti menggunakan pendekatan model pemberdayaan CIPOO (*Context-Input-Process-Output-Outcome*) yang di kemukakan oleh Sulistiyani (2004:114-121). Adapun pendekatan CIPOO yang dimaksud yaitu:

a. *Context*

Context yaitu konteks pemberdayaan agen pembaharu menjelaskan program atau kegiatan yang sesuai untuk dikembangkan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu. *Context* ini meliputi :

1. Aspek Kelembagaan

Dalam pemberdayaan HIPPA di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, aspek kelembagaan menyangkut tentang efisiensi struktur, fungsi, gaya kepemimpinan, cara pengambilan keputusan dan cara komunikasi.

Struktur dan fungsi kelembagaan merupakan salah satu hal yang dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya terkait dengan struktur dan fungsi dari HIPPA sudah dikatakan cukup efisien. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan dari Sekretaris HIPPA Bapak Rudianto yang menyatakan bahwa struktur dan fungsi dikatakan efisien karena dalam penyampaian informasi kepada petani dilakukan oleh pengurus yang memang sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Sumijan yang mengungkapkan bahwa struktur dan fungsi dari HIPPA Tirto Ringin Makmur sudah dapat dikatakan cukup efisien karena sudah sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing pengurus yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIPPA Ngringinrejo.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terkait struktur dan fungsi kelembagaan dari HIPPA Tirto Ringin Makmur, sudah dilakukan beberapa usaha untuk membuat HIPPA menjadi efisien, diantaranya dengan adanya bagan organisasi yang memperlihatkan susunan fungsi-fungsi dan departementasi yang menunjukkan hubungan kerja sama, pembagian kerja, rantai perintah dan pengelompokan segmen-segmen pekerjaan.

Aspek kedua dalam kelembagaan yaitu terkait dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini biasanya terkait dengan bagaimana seorang pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam

melakukan berbagai hal yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait dengan gaya kepemimpinan ini, dalam melakukan pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur Bapak Asrap selaku ketua HIPPA memberikan arahan kepada pengurus berdasarkan visi yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dan pemaparan sebelumnya terkait dengan gaya kepemimpinan dari Bapak Asrap dalam memimpin HIPPA Tirto Ringin Makmur sudah dapat dikatakan cukup baik dimana Bapak Asrap melakukan pengarahan kepada pengurus berdasarkan visi yang jelas yaitu untuk membuat petani sejahtera dan HIPPA menjadi perkumpulan petani yang maju.

Pada dasarnya usaha yang dilakukan Ketua HIPPA Tirto Ringin Makmur pada pelaksanaan pemberdayaan ini didasari dari keinginan Ketua HIPPA untuk mensejahterakan anggota melalui pengelolaan air yang tepat guna dan berhasil guna. Hal ini telah sesuai dengan (AD/ART) HIPPA Ngringinrejo pada bab II pasal 7 tentang maksud dimana pembentukan HIPPA “Ngringinrejo” ini bermaksud ikut serta melaksanakan pengelolaan air, jaringan irigasi secara tepat guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terkait gaya kepemimpinan, terlihat bahwa gaya kepemimpinan dari Bapak Asrap merupakan gaya kepemimpinan yang berorientasi dengan karyawan dimana gaya kepemimpinan ini lebih memperhatikan motivasi daripada mengawasi, di sini anggota HIPPA diajak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan melalui tugas-tugas yang diberikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.

Aspek ketiga dalam kelembagaan yaitu terkait dengan cara pengambilan keputusan dan komunikasi interaktif. Aspek ini biasanya berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan dan bagaimana cara komunikasi antara anggota. Terkait dengan pengambilan keputusan dan cara komunikasi ini, dalam pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur dilakukan dengan kesepakatan melalui musyawarah dengan anggota HIPPA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asrap, Bapak Padir dan Bapak Ngadiman dapat disimpulkan bahwa untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah. Namun pelaksanaannya hanya dilakukan sebagai petani, pengurus dan ketua HIPPA. Setiap orang atau bagian yang ikut dalam musyawarah merupakan communicator yang menyampaikan perintah-

perintah maupun pesan untuk melaksanakan pekerjaan. Suatu pekerjaan berhasil atau tidaknya tergantung kepada komunikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam organisasi. Komunikasi dua arah yang dilakukan melalui musyawarah ini memungkinkan proses komunikasi berjalan efektif dan dapat menciptakan lingkungan komunikatif dalam organisasi. Penggunaan manajemen partisipatif dan komunikasi tatap muka ini merupakan cara baik meningkatkan efektivitas komunikasi.

2. Aspek Sistem Manajemen

Aspek sistem manajemen dalam hal ini meliputi bagaimana organisasi melakukan fungsi manajemen yang diarahkan pada fungsi-fungsi PAFHIER yaitu *Policy Analysis, Finance, Human Relations, Information, External Relations*. Dalam pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur, aspek sistem manajemen ini meliputi bagaimana HIPPA diarahkan untuk melaksanakan program kerja yang telah dibuat, sumber-sumber keuangan dan peruntukannya, bagaimana hubungan pengurus dengan anggota dan sumber informasi, serta bagaimana HIPPA menjalin hubungan dengan mitra di luar organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asrap dan Bapak Rudianto terkait dengan program kerja yang dijalankan oleh HIPPA Tirto Ringin Makmur, secara administratif belum tersusun bagaimana program kerja yang dijalankan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dari pengurus HIPPA untuk menyusun program kerja tersebut.

Aspek kedua dalam sistem manajemen yaitu sumber-sumber keuangan dan peruntukannya. Dalam aspek ini, sistem manajemen diarahkan untuk mengelola bagaimana keuangan dalam organisasi serta bagaimana peruntukan keuangan tersebut. Seperti yang dipaparkan pada bab I sebelumnya bahwa sumber keuangan ini menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur, terutama dalam menghimpun iuran pengelolaan irigasi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asrap dapat diketahui bahwa sumber keuangan HIPPA Tirto Ringin Makmur berasal dari hasil sebetan areal sawah yaitu seperlima (1/5) dari hasil panen. Keuangan tersebut digunakan untuk mengisi kas desa setempat dan keperluan HIPPA Tirto Ringin Makmur. Hal senada juga diungkapkan Bapak Pasion dan Bapak Sumijan.

Aspek selanjutnya yaitu bagaimana hubungan pengurus dengan anggota dan sumber informasi. Dalam pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur ini, aspek ini meliputi bagaimana pengurus berhubungan dengan anggotanya, serta sumber informasi. Terkait dengan hubungan anggota, biasanya pengurus seperti Bapak Rudianto, Bapak Rasim dan Bapak Sukar yang melakukan peninjauan langsung ke lapangan atau memberi informasi kepada anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumijan dan Bapak Ngadiman telah membuktikan bahwa hubungan pengurus dengan anggota serta sumber informasi berasal dari pengurus HIPPA Tirto Ringin Makmur seperti Sekretaris, Bagian Teknis dan Ketua Blok.

Aspek terakhir dalam sistem manajemen yaitu terkait dengan bagaimana HIPPA menjalin hubungan dengan mitra di luar organisasi. Dalam pemberdayaan ini, HIPPA Tirto Ringin Makmur menjalin hubungan dengan pemerintah tanpa melibatkan swasta. Adapun yang dimaksud mitra dalam hal ini yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro dimana Dinas Pertanian sebagai perancang program, menentukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, memberikan bantuan. Sedangkan Dinas Pengairan sebagai fasilitator yang memberikan pelatihan sesuai dengan permintaan petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Nurhamid dan Bapak Asrap telah membuktikan bahwa Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan berfungsi sebagai mitra dari HIPPA Tirto Ringin Makmur. Sedangkan HIPPA Tirto Ringin Makmur sebagai pihak yang dibangkitkan dayanya melalui usaha pengelolaan air secara mandiri dan otonom. Dengan adanya peran ini, masyarakat telah digerakkan kesadarannya dan menjadi pelaku utama dalam melakukan pemberdayaan. Untuk itu masyarakat dapat dikatakan berada pada posisi obyek pembangunan dan subyek pembangunan.

3. Aspek Kinerja Organisasi

Dalam pemberdayaan HIPPA di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, aspek kinerja organisasi menyangkut tentang efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan yang baik.

Efisiensi dan efektivitas ini terkait dengan bagaimana HIPPA ditingkatkan kemampuannya yang dapat dilihat dengan adanya ketepatan dalam menggunakan sumber daya yang ada sehingga tujuan dari HIPPA sendiri dapat tercapai. Dalam

pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur, dapat dilihat dengan adanya peningkatan produksi padi anggota HIPPA dan penggunaan sumber daya yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asrap dan Bapak Sumijan tersebut telah membuktikan bahwa dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki HIPPA Tirto Ringin Makmur yang berupa keuangan dan pengurus, namun sumber daya tersebut pada akhirnya mampu untuk mencapai hasil yang optimal yang ditandai dengan adanya peningkatan produksi petani.

Aspek selanjutnya dalam kinerja organisasi yaitu terkait dengan produktivitas. Produktivitas yang dimaksud dalam pemberdayaan HIPPA ini mengenai apa saja yang telah dihasilkan oleh HIPPA Tirto Ringin Makmur. Dalam aspek ini, HIPPA Tirto Ringin Makmur telah mampu membuat AD/ART yang merupakan aturan tertulis berisi peraturan-peraturan pokok untuk menjalankan HIPPA Tirto Ringin Makmur. Selain itu juga HIPPA telah mampu untuk membuat laporan keuangan selama musim tanam sebagai wujud dari pertanggungjawaban pengurus terhadap apa yang dikelolanya selama musim tanam.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terkait produktivitas dari HIPPA Tirto Ringin Makmur menunjukan bahwa HIPPA ini telah mampu membuat AD/ART sebagai pedoman dan laporan keuangan HIPPA selama musim tanam 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus terhadap pengelolaan keuangan selama musim tanam 2015.

Aspek yang terakhir dalam kinerja organisasi yaitu kualitas pelayanan yang baik. Terkait dengan aspek ini, pemberdayaan HIPPA diarahkan untuk memberikan pelayanan yang baik untuk anggota HIPPA. Suatu pelayanan dapat dikatakan baik apabila petani merasa puas dan tidak ada keluhan akan pelayanan yang diberikan. Suatu pelayanan dapat dikatakan baik apabila petani merasa puas dan tidak ada keluhan akan pelayanan yang diberikan. Hal ini berarti bahwa dimensi reliabilitas telah terwujud dengan ditandainya pelanggan yang puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam pemberdayaan HIPPA ini, salah satu anggota HIPPA Tirto Ringin

Makmur yang bernama Bapak Jasmani mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh HIPPA selama ini tergolong cukup baik. Selain itu Bapak Rudianto juga menuturkan bahwa selama ini tidak ada keluhan dari anggota HIPPA terkait pelayanan tersebut.

4. Aspek Penguasaan Materi Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan HIPPA di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, aspek penguasaan materi pemberdayaan menyangkut tentang bagaimana organisasi memahami permasalahan yang terjadi, menemukan solusi dan pendekatan untuk mencapai kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan HIPPA di Ngringinrejo, aspek ini meliputi bagaimana HIPPA memahami AD/ART yang dijadikan pedoman sekaligus pegangan dalam menjalankan kegiatan organisasi. Terkait dengan aspek ini, materi pemberdayaan belum sepenuhnya dikuasai oleh pengurus dari HIPPA Tirto Ringin Makmur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asrap telah menunjukkan bahwa pelaksanaan beberapa kegiatan dari HIPPA Tirto Ringin Makmur tidak sesuai dengan AD/ART yang ditulis seperti iuran pengelolaan irigasi yang belum terlaksana. Namun dari wawancara tersebut setidaknya HIPPA Tirto Ringin Makmur telah mampu memahami permasalahan yang terjadi seperti belum terlaksananya pemungutan iuran pengelolaan irigasi dan menemukan solusi permasalahan berupa penghimpunan dana melalui penyebutan areal yang dilakukan setelah panen dengan menyerahkan seperlima dari hasil panen. Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa belum sepenuhnya materi pemberdayaan yang tertuang dalam AD/ART dilaksanakan dalam pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur meskipun HIPPA Tirto Ringin Makmur telah mampu memahami permasalahan yang terjadi yaitu belum terlaksananya pemungutan iuran pengelolaan irigasi dan menemukan solusi permasalahan tersebut.

b. *Input*

Input adalah seluruh potensi internal yang dimiliki oleh agen pembaharu dan eksternal yang berkaitan dengan agen pembaharu dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada proses pemberdayaan agen pembaharu. *Input* menggambarkan sumber daya, fasilitas yang diperlukan dalam memberdayakan agen pembaharu. Dalam pemberdayaan HIPPA di

Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, input menyangkut tentang sumber daya yang dimiliki dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberdayaan HIPPA.

Terkait dengan sumber daya yang dimiliki, dalam pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur sumber daya ini menyangkut sumber daya yang potensial seperti sumber daya manusia, lahan pertanian yang luas, mesin yang digunakan serta status dari organisasi HIPPA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudianto dan Bapak Asrap telah membuktikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki HIPPA Tirto Ringin Makmur dipilih berdasarkan kemampuan serta pengalaman yang dimilikinya. Hal ini menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan HIPPA kedepannya. Berdasarkan observasi peneliti terkait dengan sumber daya yang dimiliki, kegiatan yang dilakukan pengurus dalam menanggapi perubahan lingkungan berupa pengangkatan pipa akibat meluapnya Bengawan Solo terlihat bahwa pengurus HIPPA Tirto Ringin Makmur memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengenali perubahan lingkungan serta tanggap dalam perubahan tersebut dengan melakukan pengangkatan pipa agar pipa tidak terbawa arus air Bengawan Solo.

Terkait fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur, fasilitas yang dimaksud berupa fasilitas bergerak maupun tidak bergerak seperti mesin-mesin. Mesin-mesin tersebut digunakan mengingat dalam suatu pekerjaan, jumlah hasil produksi tergantung kepada mesin yang dipakai. Selama ini dalam pelaksanaan pemberdayaan HIPPA masih menggunakan beberapa fasilitas yang diberikan pada kepemimpinan sebelum Bapak Asrap. Namun beberapa fasilitas tersebut dalam keadaan rusak dan sudah tidak mampu untuk digunakan lagi seperti jaringan irigasi dan diesel. Oleh karena itu penggunaan seperti diesel diganti dengan pompa yang diberikan oleh Dinas Pertanian.

c. *Process*

Process adalah seluruh kegiatan/langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu, yang terdiri atas :

1. Pendekatan *capacity building* untuk pemberdayaan kelembagaan agen pembaharu.

Menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2007), *capacity building* berarti memampukan. Dalam pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur, pendekatan *capacity building* atau pengkapasitasan biasanya

dilakukan dengan memampukan manusia, organisasi dan sistem nilai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Nurhamid, Bapak Asrap dan Bapak Pasion untuk memampukan pengurus ditandai dengan adanya program pelatihan baik teknis maupun administrasi untuk membuat mereka terampil dalam mengelola air.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Nurhamid dan Bapak Asrap untuk memampukan organisasi agen pembaharu, dalam pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur dilakukan dengan upaya untuk membuat HIPPA menjadi badan hukum. Upaya ini dilakukan agar HIPPA mampu untuk sejajar dan mampu untuk bekerja sama dengan organisasi lain.

2. Pendekatan *New Public Management* (NPM) untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal.

Menurut Mahmudi (2003), NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Konsep *New Public Management* pada dasarnya mengandung tujuh komponen utama diantaranya manajemen profesional di sektor publik, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, menciptakan persaingan di sektor publik, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik dan penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Karakteristik tersebut menegaskan bahwa NPM terkait dengan pentingnya penciptaan regulasi menuju pelayanan yang berkualitas.

HIPPA Tirto Ringin Makmur dalam pendekatan NPM belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pengukuran kinerja yang dilakukan oleh ketua HIPPA untuk menilai kinerja masing-masing bagian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asrap menunjukkan bahwa salah satu komponen utama dalam NPM yaitu pengukuran kinerja belum dilakukan dalam pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur.

Dalam pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur, pendekatan ini ditunjukkan dengan proses yang dilakukan untuk berhubungan dengan mitranya (*External Relations*). Namun mitra yang dimaksud yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan, tidak ada peran dari swasta dalam pemberdayaan HIPPA. Terkait proses tersebut dilakukan dengan melakukan kontak dengan menteri pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Nurhamid dan Bapak Asrap telah membuktikan bahwa HIPPA Tirto Ringin Makmur dalam proses untuk menjalin hubungan dengan mitranya dilakukan melalui kontak dengan menteri pertanian. Proses ini digunakan untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberdayaan HIPPA.

Selain itu sebagai sebuah agen pembaharu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal dimulai dengan melakukan pertemuan dengan pengurus. Namun kecenderungan yang terjadi pertemuan dilakukan musiman atau ketika menjelang musim tanam.

3. Pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasional agen pembaharu.

Dalam pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur, pendekatan ini ditunjukkan dengan proses yang dilakukan untuk menghasilkan beberapa dokumen yang menjadi pedoman dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan HIPPA. Dalam hal ini, HIPPA Tirto Ringin Makmur telah mampu menyusun AD/ART dan laporan keuangan musim tanam. Adapun proses penyusunan AD/ART dilakukan pada awal pembentukan HIPPA Tirto Ringin Makmur. Sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan musim tanam sendiri, HIPPA Tirto Ringin Makmur baru pertama kali menyusunnnya pada bulan Februari 2015. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Asrap.

4. Pendekatan substansial melalui pengorganisasian *knowledge, attitude, practice* (KAP) agar agen pembaharu menguasai aspek dan substansi kemiskinan, mampu menentukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

Sebagai sebuah agen pembaharu, HIPPA Tirto Ringin Makmur diberikan berbagai pemahaman terkait dengan pengelolaan air yang tepat guna, berdaya guna dan mandiri sehingga mampu untuk menghasilkan kepuasan anggota HIPPA. Untuk menjaga kepuasan tersebut, pengurus juga harus mampu untuk memahami kondisi alam yang selalu berubah, menentukan solusi yang tepat untuk kondisi tersebut. Ketika mereka semakin menyadari pentingnya pengelolaan air secara efektif dan efisien, akan tercipta kemandirian dalam pengelolaan air tersebut. Namun jika dilihat dari pendekatan substansial melalui pengorganisasian *knowledge, attitude, practice* (KAP), dari segi *attitude* dan *practice* HIPPA Tirto Ringin Makmur pendekatan tersebut belum terlihat.

Dalam pemberdayaan ini, HIPPA Tirto Ringin Makmur sebagai agen pembaharu yang bermitra dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Yang ditandai dengan sudah tersusunnya AD/ART, laporan keuangan musim tanam, kualitas pelayanan yang baik sehingga dapat memberikan kepuasan kepada anggota karena adanya peningkatan produksi.

Namun beberapa aspek menunjukkan bahwa pemberdayaan HIPPA tidak berjalan dengan baik. Meskipun kegiatan pemberdayaan selalu dilaksanakan namun program kerja yang akan dilaksanakan belum pernah dirancang.

d. *Output*

Output adalah hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan akan mencapai kompetensi sebagai agen pembaharu yang berdaya dan mampu implementasi pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan program aksi dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat miskin.

Dalam pemberdayaan ini, HIPPA Tirto Ringin Makmur sebagai agen pembaharu yang bermitra dengan pemerintah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Yang ditandai dengan sudah tersusunnya AD/ART, laporan keuangan musim tanam, kualitas pelayanan yang baik sehingga dapat memberikan kepuasan kepada anggota karena adanya peningkatan produksi. Namun beberapa hal belum terpenuhi seperti belum adanya program kerja yang disusun.

e. *Outcome*

Outcome adalah nilai manfaat yang ditimbulkan setelah agen pembaharu memiliki tingkat keberdayaan tertentu, sehingga agen pembaharu mampu bertindak sebagai agen pembaharu dengan melakukan “peran” dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu dengan tingkat peran linear atau berbanding lurus dengan tingkat keberdayaan yang sudah dimiliki tersebut.

Setelah *output* telah dicapai maka dapat menunjukkan pada tingkat mana keberdayaan agen pembaharu. Pada pemaparan sebelumnya terlihat bahwa HIPPA Tirto Ringin Makmur berada di tahap I yakni sebagai agen pembaharu yang bermitra dalam evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Sebagai sebuah agen pembaharu, kapasitas HIPPA Tirto Ringin Makmur sebagai sebuah organisasi yang *establish* belum dikatakan tercapai dengan ditandai beberapa hal seperti berikut:

1) *Output* pemberdayaan level I

Berpijak pada permasalahan kelembagaan adalah berupa organisasi agen pembaharu yang *establish*. Jika agen pembaharu memiliki organisasi berstatus *establish*, maka telah berhak “bermitra” untuk memberikan input atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu pada tataran ini agen-agen pembaharu baru berada pada skala mulai “didengar dan diperhitungkan” suaranya.

HIPPA Tirto Ringin Makmur dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi yang belum *establish* dengan ditandai belum adanya kelengkapan kebutuhan organisasi secara kelembagaan. Kelengkapan tersebut meliputi susunan struktur dan fungsi dalam organisasi, status HIPPA Tirto Ringin Makmur sebagai organisasi yang berbadan hukum, gaya kepemimpinan yang visioner, pengambilan keputusan serta komunikasi yang interaktif. Namun dari kelengkapan tersebut, HIPPA Tirto Ringin Makmur belum menguasai materi pemberdayaan sepenuhnya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa model pemberdayaan petani melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirto Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dalam mewujudkan lumbung pangan negeri di Kabupaten Bojonegoro jika dilihat dengan pendekatan CIPOO (*Context, Input, Procces, Output, Outcome*) beberapa pendekatan belum terpenuhi. Pendekatan tersebut meliputi :

a. *Context*

Dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek kelembagaan, aspek sistem manajemen, aspek organisasi, aspek penguasaan materi pemberdayaan, HIPPA Tirto Ringin Makmur sebagai agen pembaharu sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya menguasai materi pemberdayaan.

b. *Input*

Input menggambarkan sumber daya, fasilitas yang diperlukan dalam memberdayakan agen pembaharu. Sumber daya ini antara lain yaitu sumber daya manusia dan fasilitas yang diperlukan. Sumber daya manusia yang mengelola HIPPA sudah dapat dikatakan cukup baik dimana pengurus yang ada dipilih berdasarkan pengalaman dan keahlian yang mereka miliki. Sedangkan untuk fasilitas dalam hal ini terkait dengan fasilitas yang bergerak maupun tidak bergerak yang menunjang proses pemberdayaan HIPPA.

c. *Process*

Process merupakan serangkaian langkah atau tindakan yang ditempuh untuk memberdayakan agen pembaharu. Langkah tersebut meliputi peningkatan kapasitas yang terdiri dari pelatihan teknis dan administrasi, upaya untuk membuat HIPPA menjadi badan hukum, melakukan penyadaran dan pemahaman kepada anggota akan keberadaan organisasi serta pengelolaan air yang efektif dan efisien.

d. *Output*

Beberapa aspek menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan HIPPA Tirto Ringin Makmur belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Meskipun sudah tersusun AD/ART, laporan keuangan musim tanam, kualitas pelayanan yang baik namun untuk program kerja yang akan dilaksanakan belum pernah disusun.

e. *Outcome*

Setelah *output* telah dicapai maka dapat menunjukkan pada tingkat mana keberdayaan agen pembaharu. Sebagai agen pembaharu, HIPPA Tirto Ringin Makmur berada pada tahap keberdayaan I yaitu sebagai mitra kerja/pendamping dalam evaluasi program pendampingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan belum adanya kelengkapan kebutuhan organisasi secara kelembagaan seperti belum menguasai materi pemberdayaan sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat berguna agar dalam pengelolaan kedepannya bisa lebih baik lagi. Saran tersebut antara lain:

1. Untuk Pemerintah Desa Ngringinrejo dan HIPPA Tirto Ringin Makmur

HIPPA Tirto Ringin Makmur sebagai agen pembaharu seharusnya dikelola petani secara demokratis, hal ini dikarenakan selama ini HIPPA dikelola oleh perangkat desa. Sehingga pengelolaan sering terjadi tumpang tindih. Selain itu, seharusnya anggota HIPPA juga diajak musyawarah bukan hanya aparat desa dan pengurus saja.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan melalui pelatihan harus bersifat continue. Selain itu, pelatihan juga harus dilakukan secara merata bukan hanya pengurus saja. Dalam pemberdayaan HIPPA selama ini belum ada pengawasan atau fungsi *controlling* dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan HIPPA serta bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing HIPPA di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Bojonegoro, 2012. "Buku Profil Kabupaten Bojonegoro". (online)(<http://kanalbojonegoro.com/wpcontent/uploads/2014/01/bukuprofil-bojonegoro.pdf> diunduh 15 Januari 2015)
- Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur, No. 20/03/35/Th.XI,01 Maret 2013
- BPS Kabupaten Bojonegoro. 2014. Bojonegoro Dalam Angka 2014. Bojonegoro
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Center, Media. 2014. Jelang Launching Cybex (7) : 4 Lokasi sebagai Pilot Project, (online) (<http://kanalbojonegoro.com/jelang-launching-cybex-7-4-lokasi-sebagai-pilot-project/> diakses pada 10 Januari 2015)
- Chairani, Shanty. Tanpa Tahun. *Inovasi Pendidikan*, (online), (<http://scribd.com/doc/81313414/inovasipendidikan> diakses pada 15 April 2015)
- Fahrudin, Adi (Ed.). Tanpa tahun. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Fatoni, Muhamad. 2015. Suyoto Optimistis Bisa Capai Target Produksi Padi 960 Ribu Ton, (online)(<http://blokbojonegoro.com/read/article/20150104/suyoto-optimistis-bisa-capai-target-produksi-padi-960-ribu-ton.html> diakses pada 10 Januari 2015)
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: ANDI
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat; Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Khamdani, Yosia. 2013. *Model Pemberdayaan Petani Cabai Melalui Perbaikan Rantai Nilai Distribusi (Studi Petani Cabai Di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*, (online) (<http://lib.unnes.ac.id/18198/1/7450406581.pdf> diakses pada 20 Maret 2015)
- Mahmudi. 2003. "New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik". *Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen*, (Online), (<http://journal.uui.ac.id/index.php/Sinergi/article/viewFile/919/849>, diunduh 05 Mei 2015).
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Bupati Bojonegoro, 2012. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
79/Permentan/Ot.140/12/2012 Tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pemberdayaan
Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Profil Desa Ngringinrejo Tahun 2013

Rachman, Benny dkk. 2002. "Kelembagaan Irigasi
Dalam Perspektif Otonomi Daerah". Jurnal
Litbang Pertanian, (Online),
(<http://203.176.181.70/publikasi/p3213025.pdf>,
diunduh 10 Januari 2015).

Retno, Yuni Purwanti. 2014. Model Pemberdayaan
Masyarakat "Kampung Bebek dan Telur Asin"
Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo(studi pada kelompok peternak Itik
Sumber Pangan). Skripsi Tidak Diterbitkan.
Surabaya : Program Strata 1 Universitas Negeri
Surabaya

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*.
Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat
Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan
Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sukino. 2013. *Membangun Pertanian Dengan
Pemberdayaan Masyarakat Tani. Terobosan
Menanggulangi Kemiskinan*. Yogyakarta:
Pustaka Baru Press

Sulistiyan, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-
Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava
Media

Tambunan, Tulus. 2010. *Pembangunan Pertanian dan
Ketahanan Pangan*. Jakarta: UI-Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun
2012 Tentang Pangan

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto.
2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah
pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan
Masyarakat*. Jakarta : Elex Media
Komputindo/Gramedia

Yudha, Karunia Pranata dkk. Tanpa Tahun.
"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2009 Dalam Perspektif
Sustainable Development". Jurnal Administrasi
Publik, (Online),
([http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id
/index.php/jap/article/viewFile/136/120](http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/136/120),
diunduh 20 Februari 2015)